

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi bukanlah peristiwa yang berlaku di semua negara. Terutama di negara-negara di Asia dan Afrika yang tidak dapat menikmati sepenuhnya peningkatan dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Sampai pada pertengahan abad ke-20, banyak negara-negara berkembang yang belum mengalami pertumbuhan yang berarti.

Pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan dalam analisis makroekonomi adalah masalah kelesuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Bahwa pada umumnya berbagai ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dari pada tingkat pertumbuhan yang secara potensial dapat dicapainya (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi termasuk dalam salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang ditentukan oleh PBB sebagai agenda pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tertera dalam tujuan yang ke delapan, tujuan itu berbunyi “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”. Pertumbuhan Ekonomi dianggap sangatlah penting untuk

keberlanjutan agenda pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi patokan dari suatu pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau suatu daerah dalam jangka periode tertentu. Ketika target pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah tercapai, maka dapat dikatakan pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target maka pembangunan yang dilakukan tidak berjalan sesuai rencana, terutama jika tidak terjadi pertumbuhan ekonomi sama sekali atau bahkan terjadi penurunan, maka diperlukan evaluasi dari kinerja pembangunan yang dilakukan. Adapun faktor-faktor ataupun kebijakan yang terbukti efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan atau bahkan dikembangkan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi selalu dijadikan patokan untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr: 07:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿الحشر : ٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah

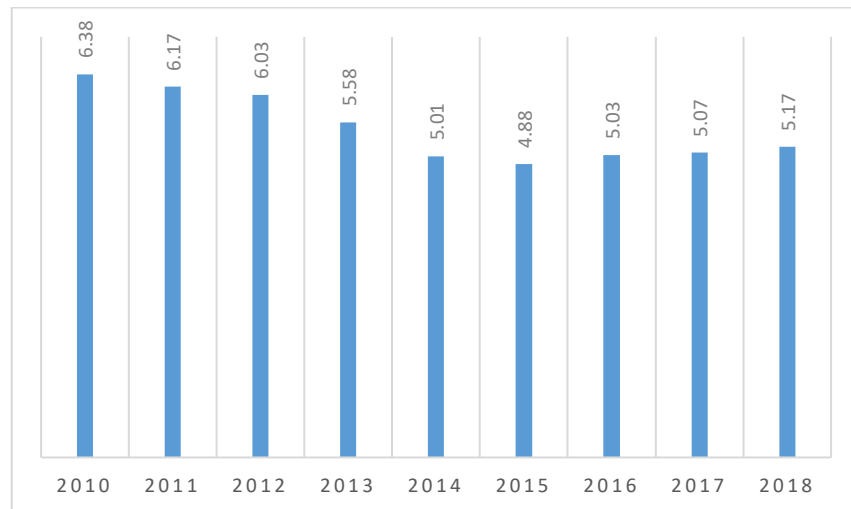
untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, **supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu**. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q.S Al-Hasyr: 07). Dari ayat di atas Allah SWT menjelaskan tentang kesejahteraan **“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”**. Maksudnya bahwa kesejahteraan itu milik bersama bukan hanya milik segelintir orang saja. Maka dari itu kesejahteraan dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat suatu bangsa atau daerah. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara atau daerah maka juga terjadi peningkatan pada pendapatan perkapita masyarakatnya. Ketika pendapatan perkapita masyarakat meningkat maka daya beli masyarakat juga ikut meningkat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau daerah pasti akan membawa kesejahteraan yang lebih kepada masyarakatnya.

Wahyudin dan Yuliadi (2013) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses yang multidimensial, proses multidimensial ini termasuk perubahan-perubahan yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat, dan perubahan dalam kelembagaan (institusi)

nasional. Perubahan yang terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan juga termasuk dalam pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, maka dapat kita lihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa terbitan.

Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2018 (persen)

Gambar 1.1 memperlihatkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2010-2018. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6,38% kemudian pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 6,17% dan terus mengalami perlambatan pertumbuhan sampai tahun 2015 yaitu sebesar 4,88%, dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali mengalami kenaikan menjadi 5,03%, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 kembali naik menjadi 5,07% dan di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali naik menjadi 5,17%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat lepas dari peranan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia. Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi menurut wilayah di Indonesia

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen)

Wilayah	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Sumatera	3,53	4,29	4,3	4,54
Jawa	5,48	5,6	5,61	5,72
Bali dan Nusa Tenggara	10,42	5,92	3,73	2,68
Kalimantan	1,38	2,02	4,33	3,91
Sulawesi	8,19	7,43	6,99	6,65
Maluku dan Papua	6,28	7,4	4,89	6,99
Indonesia	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa terbitan

Tabel 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada beberapa wilayah dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2015-2018 pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera dan Kalimantan terus mengalami peningkatan akan tetapi masih selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara dari tahun 2015-2018 terus mengalami penurunan dari 10,42% pada tahun 2015 turun sampai 2,68% di tahun 2018. Untuk Maluku dan Papua terjadi pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dari tahun 2015-2018. Adapun pertumbuhan ekonomi pulau Jawa dari tahun 2015-2018 selain terus mengalami peningkatan, pertumbuhannya juga selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Selain pulau Jawa ada pulau Sulawesi yang pertumbuhannya selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi di pulau Sulawesi pada tahun 2015-2018 meskipun mengalami penurunan dari 8,19% di tahun 2015 menjadi 6,65% di tahun 2018, akan tetapi pertumbuhan ekonomi di pulau Sulawesi terbilang tinggi di banding wilayah lainnya di Indonesia bahkan pada tahun 2016 dan 2017

wilayah Sulawesi menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Ditinjau dari perannya, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera. Di bawah ini merupakan tabel peranan wilayah dalam pembentukan PDB nasional.

Tabel 1.2. Peranan Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 2015-2017 (persen)

Wilayah	Tahun		
	2015	2016	2017
Sumatera	22,17	22,02	21,66
Jawa	58,34	58,52	58,49
Bali dan Nusa Tenggara	3,07	3,12	3,11
Kalimantan	8,16	7,86	8,20
Sulawesi	5,91	6,04	6,11
Maluku dan Papua	2,35	2,44	2,43
34 Provinsi	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa ditinjau dari peranannya, wilayah Jawa merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada PDB nasional yaitu diatas 50 persen dari PDB nasional dari tahun 2015-2017 yang mana ini disebabkan aktivitas perekonomian yang masih terpusat di pulau Jawa. Kemudian penyumbang kontribusi terbesar kedua pada PDB nasional adalah wilayah Sumatera yaitu sebesar 20 persen dari PDB nasional. Adapun kontribusi wilayah lainnya pada PDB nasional masih dibawah sepuluh persen dengan wilayah Kalimantan sebesar 7-8 persen dari PDB nasional, wilayah Sulawesi dengan 5-6 persen dari PDB nasional, wilayah Bali dan Nusa Tenggara

sebesar 3 persen dari PDB nasional, dan wilayah Maluku dan Papua yang kontribusinya masih dibawah 3 persen dari PDB nasional.

Di antara beberapa wilayah, pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sulawesi selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun demikian peranan kontribusi wilayah Sulawesi terhadap PDB nasional masih dibawah 10 persen yaitu sebesar 5-6 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan wilayah Kalimantan yang berkontribusi sebesar 7-8 persen terhadap PDB nasional.

Menurut Wahyudin dan Yuliadi (2013), untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menjadi parameter dalam menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah. Di bawah ini terdapat tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada 6 provinsi di pulau Sulawesi.

Tabel 1.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dari Tahun 2016-2019 pada 6 Provinsi di Pulau Sulawesi (Miliar Rupiah)

NO	Provinsi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	SULAWESI UTARA	74764,66	79485,474	84258,691	89028,051
2	SULAWESI TENGAH	91014,565	97474,859	103617,69	111003,07
3	SULAWESI SELATAN	269401,31	288814,17	309243,63	330605,13
4	SULAWESI TENGGARA	77745,512	83001,823	88328,518	94078,149
5	GORONTALO	23507,209	25090,345	26722,593	28432,867
6	SULAWESI BARAT	27524,767	29347,194	31176,59	32873,532

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1.3 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 6 provinsi di pulau Sulawesi tahun 2016-2019. Dari tahun 2016-2019 semua provinsi yang ada di pulau Sulawesi mengalami peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di antara 6 provinsi yang ada di pulau Sulawesi, provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi dengan PDRB tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Adapun provinsi dengan PDRB terendah adalah provinsi Gorontalo.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah modal manusia (*human capital*). Menurut Anwar (2018), modal manusia menjadi menjadi salah satu faktor yang penting dalam membangun perekonomian suatu negara, karena dengan banyaknya modal manusia yang berkualitas pada suatu negara maka akan memiliki dampak yang lebih besar bagi pembangunan perekonomian negara tersebut. Dari Tabel 1.4 dapat kita lihat kondisi modal manusia di pulau Sulawesi dari sisi pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah (RLS) dan dari sisi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH).

Tabel 1.4. Kondisi Modal Manusia di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019
(Tahun)

Tahun	Indikator Modal Manusia	
	RLS	AHH
2015	7,78	68,31
2016	7,9	68,34
2017	8,07	68,36
2018	8,23	68,65
2019	8,46	68,99

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1.4 memperlihatkan kondisi modal manusia dari sisi pendidikan dan kesehatan. Kondisi pendidikan dan kesehatan di pulau Sulawesi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini ditunjukkan dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan hidup (AHH) yang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2019. Ini menunjukkan ada peningkatan kualitas modal manusia baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kesehatan di pulau Sulawesi. Peningkatan pada modal manusia yang terjadi di pulau Sulawesi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau Sulawesi.

Selain modal manusia, desentralisasi fiskal dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal adalah pengalihan kewenangan fiskal yang diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat guna efisiensi dan ekonomis. Salah satu bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Manek dan Badrudin (2016) mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) dengan tujuan pemerataan keuangan di daerah. Pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik

dengan memanfaatkan transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Dari tabel 1.5 dapat kita lihat jumlah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada di pulau Sulawesi.

Tabel 1.5. Perkembangan Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019

Tahun	Dana Alokasi Umum (Juta Rp)
2015	6345962
2016	6742958
2017	9015294
2018	9131106
2019	9409019

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan beberapa terbitan

Tabel 1.5 memperlihatkan perkembangan jumlah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) di pulau Sulawesi tahun 2015-2019. Dapat kita lihat bahwa selama 5 tahun terakhir jumlah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) di pulau Sulawesi terus mengalami peningkatan. Peningkatan transfer DAU diharapkan dapat menutup celah fiskal di daerah sehingga ada pemerataan keuangan daerah dalam rangka desentralisasi guna mendorong kegiatan pembangunan daerah menjadi lebih efisien dan ekonomis sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dikemukakan oleh Solow-Swan mengatakan pertumbuhan ekonomi bergantung kepada

pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi (Sukirno, 2006).

Tenaga kerja (*Labor*), selama ini dipandang sebagai faktor positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa (Sukirno, 2008). Dari tabel 1.6 dapat kita lihat perkembangan jumlah tenaga kerja yang ada di pulau Sulawesi.

Tabel 1.6. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di Pulau Sulawesi Tahun 2015-2019

Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)
2015	8462017
2016	9035720
2017	8725369
2018	9133524
2019	9235805

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) berbagai terbitan

Tabel 1.6 menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang ada di pulau Sulawesi dari tahun 2015-2019. Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah tenaga kerja di pulau Sulawesi sering mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja akan berdampak pada produksi. Peningkatan yang terjadi pada jumlah tenaga kerja akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam studi-studi pertumbuhan ekonomi sebelumnya terdapat penelitian yang menggunakan variabel rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup,

Dana Alokasi Umum (DAU), dan tenaga kerja sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian telah menemukan pengaruh positif modal manusia (rata-rata lama sekolah) terhadap pertumbuhan ekonomi (Anwar, 2018; Sani dkk. 2018; dan Lucya dan Anis, 2019). Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan bahwa modal manusia (angka harapan hidup) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wang dan Liu, 2016; Ogundari dan Awokuse, 2018; dan Azam dkk. 2019). Adapun penelitian terdahulu lainnya menemukan pengaruh positif dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi (Nisa, 2017; Fahma dan Nuraini, 2017). Sani, (2018) Selain menyimpulkan pengaruh positif modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitiannya juga menemukan adanya pengaruh positif tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian lain juga menyimpulkan pengaruh positif tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi (Ruhlen dan Gunawan, 2018; Sabilla dan Jaya, 2014).

Dari uraian latar belakang dan studi-studi penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui apakah rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di pulau Sulawesi. Oleh karena itu penulis menggunakan judul **“Determinan Pertumbuhan Ekonomi pada Enam Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2019”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terfokus dan tidak meluas maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus pada pengaruh rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019?
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2010-2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah mengenai pembahasan dari penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi terkhusus pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang pertumbuhan ekonomi di daerah.
2. Bagi peneliti dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan baru tentang variabel-variabel apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan tentang kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.